

GUNTINGAN BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar : Kompas

Tanggal : 24 Januari 2011

Subyek : Pertambangan

Hal : 22

PERTAMBANGAN Empat Perusahaan Terancam Ditutup

Palembang, Kompas - Pemerintah Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, mengancam mencabut izin usaha penambangan bagi empat perusahaan tambang batu bara yang belum membayar biaya reklamasi lahan kepada pemerintah daerah. Perusahaan terkait diberi tenggang waktu hingga akhir Januari 2011.

Menurut Kepala Bidang Pertambangan Umum Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kabupaten Lahat Kosasih, Sabtu (22/1), di Palembang, selama 2010 ada delapan perusahaan yang mengantongi izin usaha pertambangan. Kedelapan perusahaan masih dalam tahap eksplorasi.

"Ada empat perusahaan yang belum membayar biaya jaminan reklamasi atau pemulihan lahan, meliputi PT BT, PT BGG, PT BP, dan PTPN. Adapun empat perusahaan lain, yakni PT SMS, PT DRP, PT ABS, dan PT ATP, sudah memberikan bukti setor jaminan reklamasi," kata Kosasih. Distamben memberikan toleransi hingga akhir 2010 bagi semua perusahaan untuk membayar biaya jaminan reklamasi lahan. Karena ada empat perusahaan yang belum membayar, maka Pemkab Lahat memberikan tenggang waktu pembayaran hingga akhir Januari 2011.

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Lahat Niko Pransisko mendesak Pemkab tidak menerbitkan izin eksploitasi bagi perusahaan yang belum membayar biaya jaminan reklamasi. Biaya reklamasi merupakan komponen yang wajib dibayar sebelum perusahaan beroperasi. Biaya itu merupakan jaminan agar perusahaan terkait tidak langsung pergi dari Lahat setelah kontrak pertambangan selesai. Berdasarkan data pemerintah, Kabupaten Lahat memiliki cadangan batu bara 2,1 miliar ton. Namun, produksi batu bara di kawasan cadangan terbesar Pulau Sumatera baru 800.000 ton per tahun.

Menurut Bupati Lahat Syaifudin Aswari, eksploitasi batu bara belum didukung kesiapan sistem transportasi. Dia berharap pemerintah pusat dan provinsi merealisasikan rencana pembangunan rel kereta api khusus batu bara ke Tanjung Api-api.

Manfaat kemiri

Dari Kalimantan Barat dilaporkan, pohon kemiri cocok untuk mereklamasi lahan bekas pertambangan emas rakyat karena sifatnya adaptif dan memberi nilai tambah ekonomi.

Dosen Fakultas Pertanian Universitas Tanjungpura, Kalimantan Barat, Urai Suci, mengatakan, hasil penelitiannya tahun 2007 menunjukkan, pohon kemiri (*Aleurites moluccana*) bisa hidup di lahan bekas pertambangan. "Lahan bekas tambang biasanya kehilangan unsur hara dan ada sejumlah larutan yang bisa meracuni tanaman. Untuk mengatasi, lahan bekas pertambangan diberi pupuk organik pelarut fosfat dan jamur mikoriza untuk memperbaiki unsur hara tanah," kata Urai.

Pekan lalu, Kepala Seksi Konservasi Distamben Kalbar Bambang Santoso mengatakan, reklamasi bekas pertambangan emas sulit dilakukan. Penyebabnya adalah lahan bekas tambang biasanya dalam kondisi sangat kritis dan tak tersedia anggaran yang memadai untuk mengatasi. Di sisi lain, penghasilan rakyat petambang pas-pasan sehingga tak memiliki cukup dana untuk pemulihan lokasi pascaeksploitasi. (ONI/AHA)